

EDUKASI DAN PENDAMPINGAN TATA KELOLA LINGKUNGAN BERBASIS PARTISIPASI WARGA DI KELURAHAN SUMUR PECUNG

Febryan Ajeng Ramdani¹⁾, Lulu Salsabila²⁾, Lisha Rosmalia³⁾

^{1,2,3}Universitas Pamulang

e-mail: dosen02894@unpam.ac.id

Abstract

Environmental problems at the village level are not only related to the technical aspects of management, but are also influenced by low environmental literacy, suboptimal community participation, and limited local institutional capacity in supporting sustainable environmental governance. This community service program aims to increase community understanding and strengthen environmental governance based on citizen participation in Sumur Pecung Village, Serang City. The activity was carried out with a participatory empowerment approach through the stages of preparation and initial mapping, socialization and presentation of materials, interactive discussions, implementive assistance, participatory monitoring and evaluation, and strengthening program sustainability. The activity involved approximately 20 people consisting of village officials, RT/RW chairs, community leaders, youth, and citizen representatives. The methods used include the delivery of material on participation-based environmental governance, group discussions, identification of environmental problems, and assistance in the preparation of joint action plans. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the importance of sustainable environmental management, a growing awareness that environmental management is a shared responsibility, and an increasing commitment of the community and the village government to strengthen coordination in the implementation of environmental programs. In addition, the activity successfully identified three main problems, namely the limited public understanding of environmental management practices, the lack of optimal active citizen involvement and coordination between the community and the village government, and the limited capacity of local institutions in supporting community-based environmental governance.

Keywords: Environmental Governance, Citizen Participation, Community Empowerment, Local Institutions.

Abstrak

Permasalahan lingkungan di tingkat kelurahan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi lingkungan, belum optimalnya partisipasi masyarakat, serta terbatasnya kapasitas kelembagaan lokal dalam mendukung tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat serta memperkuat tata kelola lingkungan berbasis partisipasi warga di Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan partisipatif melalui tahapan persiapan dan pemetaan awal, sosialisasi dan pemaparan materi, diskusi interaktif, pendampingan implementatif, monitoring dan evaluasi partisipatif, serta penguatan keberlanjutan program. Kegiatan melibatkan kurang lebih 20 orang yang terdiri atas aparatur kelurahan, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan warga. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi mengenai tata kelola lingkungan berbasis partisipasi, diskusi kelompok, identifikasi permasalahan lingkungan, serta pendampingan penyusunan rencana aksi bersama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, tumbuhnya kesadaran bahwa pengelolaan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, serta meningkatnya komitmen masyarakat dan pemerintah kelurahan untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program lingkungan. Selain itu, kegiatan berhasil mengidentifikasi tiga persoalan utama, yaitu masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai praktik pengelolaan lingkungan, belum optimalnya keterlibatan aktif warga dan koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah kelurahan, serta terbatasnya kapasitas kelembagaan lokal dalam mendukung tata kelola lingkungan berbasis komunitas.

Kata Kunci: Tata kelola lingkungan, partisipasi warga, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan lokal

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan transisi ekonomi digital, pembangunan wilayah menjadi tantangan kompleks yang infrastruktur, dan peluang kerja, terus menjadi isu utama bagi banyak negara berkembang maupun negara maju. Pada saat yang sama, dinamika urbanisasi cepat menimbulkan tekanan pada kapasitas institusional di tingkat lokal, yang sering kali tidak sejalan dengan kebijakan nasional maupun regional.(Amalia et al., 2025) Pembangunan di tingkat kelurahan tidak hanya diarahkan pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan, supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak atau musnah kehidupan bisa terganggu.(Subang, 2025)

Tata kelola lingkungan yang baik menjadi prasyarat dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan wilayah terhadap berbagai persoalan ekologis. Dalam perspektif *collaborative environmental governance*, keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya melalui proses partisipatif yang berkelanjutan (Arai et al., 2021). Oleh karena itu, pembangunan lingkungan tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah semata, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Di Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang, peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat telah diikuti oleh munculnya berbagai persoalan lingkungan, seperti meningkatnya volume sampah rumah tangga, belum optimalnya pengelolaan

limbah domestik, serta masih terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kondisi tersebut membuktikan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan lemahnya kolaborasi antaraktor lokal. Penelitian Lukman et al. (2021) menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat akan berjalan efektif apabila didukung oleh koordinasi kelembagaan yang kuat serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan lingkungan.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Mubiyarto (1984) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan masyarakat untuk membantu keberhasilan suatu program sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa harus mengorbankan kepentingannya. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kemauan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam setiap program pemerintah. Sejalan dengan itu, Ndraha (1990) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan warga dalam kegiatan bersama, sedangkan Mikkelsen (1999) dalam Abidin (2023) memandang partisipasi tidak hanya sebagai kontribusi masyarakat terhadap program, tetapi juga sebagai proses membangun kesadaran masyarakat agar mampu menerima dan menjalankan program pembangunan. Sementara itu, Sari (2024) menegaskan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan di sekitarnya. Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola lingkungan yang efektif.

Walaupun hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kelurahan Sumur Pecung masih memandang pengelolaan lingkungan

sebagai tanggung jawab pemerintah kelurahan atau petugas kebersihan. Persepsi tersebut berdampak pada rendahnya inisiatif masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Kondisi ini sejalan dengan pandangan George Homans dalam Suaib (2023) yang menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sikap apatis, kondisi sosial ekonomi, karakteristik demografis, maupun kondisi geografis masyarakat. Akibatnya, berbagai kegiatan lingkungan masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat insidental dan belum berkembang menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.

Selain aspek partisipasi, tantangan lain yang dihadapi mitra adalah masih terbatasnya kapasitas kelembagaan lokal dalam mengelola program lingkungan. Motivasi kerja dapat diartikan sebagai keadaan internal atau eksternal yang mempengaruhi individu untuk berperilaku dengan cara tertentu (Petcharak, 2019). Salah satu faktor utama dalam meningkatkan motivasi kerja adalah faktor pemimpin dan lingkungan kerja. (Wahyudin et al., 2025). Disiplin kerja sangat krusial bagi perusahaan atau lembaga pemerintah untuk mencapai tujuannya karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal (Dan et al., 2025) Kegiatan gotong royong yang telah berjalan belum diikuti oleh sistem perencanaan, koordinasi, monitoring, maupun evaluasi yang terstruktur. Di sisi lain, literasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah berbasis prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) masih relatif rendah sehingga perilaku ramah lingkungan belum berkembang secara optimal. Dalam sumber penelitian terbaru menunjukkan bahwa rendahnya literasi lingkungan dan lemahnya kapasitas kelembagaan lokal merupakan faktor yang menyebabkan berbagai program lingkungan sulit dipertahankan setelah kegiatan selesai

dilaksanakan (Mandasari et al., 2025; Salsabilla et al., 2025).

Berdasarkan telaah dari berbagai sumber penelitian terdahulu yang dikaitkan dengan dengan urgensi pengabdian ini, maka sebagian besar kegiatan pengabdian maupun penelitian mengenai pengelolaan lingkungan masih berfokus pada sosialisasi, pengelolaan sampah, atau implementasi program lingkungan tertentu. Sementara itu, pendekatan yang mengintegrasikan edukasi masyarakat, pendampingan berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pembangunan kolaborasi antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *practice gap*, yaitu belum optimalnya model pemberdayaan masyarakat yang mampu menghubungkan peningkatan literasi lingkungan dengan penguatan tata kelola lingkungan berbasis komunitas secara berkelanjutan.

Berangkat dari kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menawarkan pendekatan yang mengombinasikan edukasi, diskusi partisipatif, dan pendampingan implementatif sebagai satu kesatuan proses pemberdayaan masyarakat. Keunikan program ini terletak pada penguatan tiga dimensi secara simultan, yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai tata kelola lingkungan, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, serta pembangunan kolaborasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam menyusun rencana aksi lingkungan yang berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu mengubah partisipasi masyarakat yang sebelumnya bersifat sporadis menjadi lebih terorganisasi, sekaligus memperkuat keberlanjutan program lingkungan di Kelurahan Sumur Pecung. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata kelola lingkungan berbasis partisipasi, memperkuat kapasitas kelembagaan lokal, serta membangun kolaborasi yang lebih

efektif antara pemerintah kelurahan dan masyarakat sebagai fondasi pengelolaan lingkungan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten pada bulan Mei 2026. Mitra kegiatan terdiri atas aparatur Kelurahan Sumur Pecung, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, kader lingkungan, unsur pemuda, serta perwakilan masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan lingkungan di wilayah kelurahan. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 20 orang yang dipilih secara acak berdasarkan keterlibatan dan perannya dalam aktivitas kemasyarakatan serta pengelolaan lingkungan di tingkat kelurahan. Metode pelaksanaan kegiatan dirancang sebagai proses pemberdayaan masyarakat yang bertahap, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Pendekatan yang digunakan tidak menempatkan masyarakat sebagai objek penerima program, tetapi sebagai subjek yang terlibat aktif sejak tahap identifikasi permasalahan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta memiliki peluang keberlanjutan yang lebih tinggi setelah program selesai dilaksanakan. Metode utama yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri atas dua bentuk kegiatan, yaitu:

Pemaparan Materi, Metode pemaparan materi bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tata kelola lingkungan berbasis partisipasi warga. Materi yang disampaikan meliputi konsep tata kelola lingkungan, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan, penguatan kelembagaan lokal, serta peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pemerintah

kelurahan. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif menggunakan pendekatan andragogi sehingga peserta dapat mengaitkan materi dengan pengalaman yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Diskusi Interaktif, Metode diskusi interaktif bertujuan menggali pengalaman, kebutuhan, serta permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Diskusi dilakukan secara partisipatif melalui dialog antara tim pengabdian, aparatur kelurahan, dan masyarakat sehingga setiap peserta memperoleh kesempatan menyampaikan pendapat maupun alternatif solusi. Hasil diskusi menjadi dasar dalam penyusunan rencana aksi bersama yang sesuai dengan kondisi Kelurahan Sumur Pecung. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan, diantaranya: Tahap Persiapan dan Pemetaan Awal, Tahap awal dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Kelurahan Sumur Pecung, tokoh masyarakat, serta kelompok warga yang menjadi mitra kegiatan. Pada tahap ini tim pengabdian melakukan observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting tata kelola lingkungan, menginventarisasi potensi dan permasalahan lingkungan, serta memetakan tingkat partisipasi masyarakat. Observasi dipadukan dengan wawancara informal dan diskusi awal sehingga diperoleh gambaran kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan materi dan strategi pelaksanaan kegiatan. Tahap Sosialisasi dan Pemaparan Materi, Tahap ini bertujuan memberikan penguatan pengetahuan mengenai pentingnya tata kelola lingkungan berbasis partisipasi masyarakat. Materi disampaikan secara komunikatif dengan memperhatikan karakteristik peserta sebagai pembelajar dewasa. Selain penyampaian konsep, peserta juga diberikan contoh praktik baik pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat yang dapat diterapkan sesuai kondisi lokal.

Tahap Diskusi Interaktif dan Perumusan Rencana Aksi, Setelah

penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan melalui diskusi kelompok untuk mengidentifikasi persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat serta merumuskan alternatif penyelesaiannya. Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil sehingga setiap peserta dapat menyampaikan pengalaman dan gagasan secara lebih aktif. Hasil diskusi selanjutnya disepakati menjadi rencana aksi bersama yang akan didampingi oleh tim pengabdian. Tahap Pendampingan Implementatif, Pendampingan dilakukan melalui kunjungan lapangan, konsultasi, serta pembinaan kepada masyarakat selama pelaksanaan rencana aksi. Tujuan tahap ini adalah memastikan bahwa hasil diskusi tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata oleh masyarakat. Pendampingan juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan. Tahap Monitoring dan Evaluasi Partisipatif, Monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh peserta kegiatan. Evaluasi dilaksanakan melalui forum refleksi, diskusi kelompok, serta pengisian lembar evaluasi untuk mengetahui perubahan pengetahuan, tingkat partisipasi, dan respons peserta terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Setiap temuan hasil evaluasi dibahas bersama sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan program. Tahap Penguatan Keberlanjutan Program, Tahap akhir difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan lokal agar program dapat berlanjut setelah kegiatan pengabdian selesai. Tim pengabdian bersama pemerintah kelurahan mengidentifikasi kader lingkungan yang akan menjadi penggerak utama kegiatan serta menyusun rencana tindak lanjut yang dapat diintegrasikan ke dalam program rutin Kelurahan Sumur Pecung. Pendampingan dilakukan secara bertahap hingga masyarakat mampu melaksanakan program

secara mandiri. Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian ini, yaitu: observasi lapangan terhadap kondisi lingkungan dan partisipasi masyarakat, wawancara dan diskusi dengan aparatur kelurahan serta peserta kegiatan, dokumentasi kegiatan berupa foto, daftar hadir, dan notulen diskusilembar evaluasi peserta yang diisi pada akhir kegiatan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepuasan peserta.

Indikator Keberhasilan dari kegiatan pengabdian ini, antara lain: Minimal 80% peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, Terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai tata kelola lingkungan berbasis partisipasi berdasarkan hasil evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan, Terbentuknya rencana aksi bersama dalam pengelolaan lingkungan di Kelurahan Sumur Pecung, Meningkatnya komitmen pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan lingkungan secara kolaboratif, Teridentifikasinya kader atau kelompok masyarakat yang siap melanjutkan program setelah kegiatan pengabdian selesai. Metode pelaksanaan ini menekankan keseimbangan antara transfer pengetahuan melalui pemaparan materi dan penguatan kapasitas melalui diskusi interaktif serta pendampingan lapangan. Pendekatan yang humanis, partisipatif, dan kontekstual diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat yang berkelanjutan dalam mendukung tata kelola lingkungan di Kelurahan Sumur Pecung. Dengan tahapan yang sistematis, kolaboratif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan model pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi warga yang dapat direplikasi pada wilayah lain dengan karakteristik yang serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang dengan melibatkan 20

peserta yang terdiri atas aparatur kelurahan, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, unsur pemuda, kader lingkungan, dan perwakilan warga. Kegiatan disusun secara bertahap sesuai metode pemberdayaan partisipatif yang telah dirancang, yaitu melalui tahap persiapan dan pemetaan awal, sosialisasi, diskusi interaktif, pendampingan implementatif, monitoring dan evaluasi partisipatif, serta penyusunan rencana tindak lanjut. Pendekatan tersebut bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan sebagai subjek yang terlibat aktif dalam mengidentifikasi persoalan, merumuskan solusi, dan menyusun komitmen bersama dalam pengelolaan lingkungan. Pada tahap awal dilakukan observasi lapangan dan koordinasi dengan pemerintah kelurahan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting tata kelola lingkungan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi masyarakat meliputi masih rendahnya literasi mengenai pengelolaan lingkungan berkelanjutan, belum optimalnya keterlibatan warga dalam kegiatan lingkungan, serta terbatasnya kapasitas kelembagaan lokal dalam mengkoordinasikan berbagai program lingkungan secara berkesinambungan. Temuan tersebut sejalan dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan sehingga materi dan strategi pelaksanaan kegiatan difokuskan pada penguatan ketiga aspek tersebut.

Tahap sosialisasi dilaksanakan melalui penyampaian materi mengenai konsep tata kelola lingkungan berbasis partisipasi masyarakat, pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan warga, prinsip pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), serta penguatan kapasitas kelembagaan lokal. Penyampaian materi menggunakan pendekatan andragogi sehingga peserta dapat menghubungkan konsep yang disampaikan dengan pengalaman nyata yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya,

kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi persoalan lingkungan, menyusun alternatif solusi, serta merumuskan rencana aksi yang dapat diimplementasikan sesuai kondisi Kelurahan Sumur Pecung. Untuk mengetahui efektivitas kegiatan, tim pengabdian melakukan evaluasi sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) penyampaian materi menggunakan lembar evaluasi yang mengukur pemahaman peserta terhadap empat aspek utama, yaitu konsep tata kelola lingkungan, partisipasi masyarakat, prinsip pengelolaan sampah berbasis 3R, dan penguatan kelembagaan lokal. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui observasi partisipatif, forum refleksi, serta diskusi kelompok guna mengetahui perubahan sikap dan komitmen peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Peningkatan tersebut terlihat dari hasil perbandingan nilai rata-rata pre-test dan post-test sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Table 1. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Indikator Pengetahuan	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan
Memahami konsep tata kelola lingkungan	58	91	33
Memahami pentingnya partisipasi masyarakat	61	95	34
Memahami prinsip pengelolaan sampah berbasis 3R	54	89	35
Memahami peran kelembagaan lokal	57	90	33
Rata-rata	57,5	91,3	33,8

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat dari 57,5% sebelum kegiatan menjadi 91,3% setelah kegiatan atau mengalami peningkatan sebesar 33,8 poin persentase. Capaian tersebut menunjukkan bahwa metode edukasi partisipatif yang mengombinasikan penyampaian materi, diskusi interaktif, dan pendampingan implementatif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata kelola lingkungan berbasis partisipasi warga. Peningkatan ini juga telah memenuhi indikator keberhasilan program sebagaimana ditetapkan pada tahap perencanaan kegiatan, yaitu terjadinya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Selain peningkatan aspek pengetahuan, perubahan juga terlihat pada sikap dan komitmen peserta. Pada awal kegiatan sebagian besar peserta masih memandang bahwa pengelolaan lingkungan merupakan tanggung jawab utama pemerintah kelurahan atau petugas kebersihan. Namun setelah mengikuti proses edukasi dan diskusi partisipatif, peserta mulai memahami bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan memerlukan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Perubahan persepsi tersebut tercermin dari meningkatnya antusiasme peserta dalam menyampaikan gagasan, mengidentifikasi persoalan lingkungan di wilayah masing-masing, serta menyusun rencana aksi bersama yang akan dilaksanakan setelah kegiatan berakhir. Hasil Diskusi Partisipatif dan Penyusunan Rencana Aksi Bersama.



Gambar 1. Dokumentasi saat memberikan penjelasan kepada masyarakat

Diskusi partisipatif menjadi tahapan penting dalam kegiatan ini karena memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengemukakan berbagai persoalan lingkungan berdasarkan pengalaman yang mereka hadapi secara langsung. Berbeda dengan metode sosialisasi yang bersifat satu arah, diskusi kelompok mendorong terjadinya proses pembelajaran bersama (*collective learning*) antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan tim pengabdian. Melalui pendekatan tersebut diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya tata kelola lingkungan di Kelurahan Sumur Pecung. Hasil diskusi menunjukkan terdapat tiga persoalan utama yang menjadi perhatian masyarakat. Pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, khususnya berkaitan dengan pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan sampah rumah tangga, dan penerapan prinsip 3R. Kedua, belum optimalnya koordinasi antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat sehingga berbagai kegiatan lingkungan masih bersifat insidental dan belum menjadi agenda bersama yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Ketiga, kapasitas kelembagaan lokal masih terbatas sehingga belum mampu mengoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi berbagai kegiatan lingkungan secara sistematis. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, peserta bersama tim pengabdian menyusun

rencana aksi yang menjadi dasar pelaksanaan program lanjutan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Permasalahan dan Rencana Aksi Bersama

Permasalahan	Rencana Aksi
Rendahnya literasi lingkungan	Edukasi lingkungan secara berkala pada tingkat RT/RW
Belum optimalnya partisipasi masyarakat	Pelaksanaan kerja bakti dan forum warga secara rutin
Belum adanya koordinasi yang terstruktur	Pembentukan forum koordinasi lingkungan tingkat kelurahan
Terbatasnya kapasitas kelembagaan	Pendampingan kader lingkungan dan penyusunan rencana kerja tahunan

Penyusunan rencana aksi secara partisipatif menjadi salah satu luaran penting dari kegiatan ini karena memberikan arah yang lebih jelas terhadap pelaksanaan program lingkungan setelah kegiatan pengabdian selesai. Rencana aksi tersebut tidak hanya memuat daftar kegiatan yang akan dilaksanakan, tetapi juga pembagian peran antara pemerintah kelurahan, RT/RW, tokoh masyarakat, pemuda, dan kader lingkungan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai mitra yang memiliki tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memadukan edukasi, diskusi partisipatif, dan pendampingan implementatif mampu menghasilkan perubahan tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada tumbuhnya komitmen kolektif masyarakat untuk memperkuat tata kelola lingkungan berbasis partisipasi warga. Hasil ini menjadi dasar untuk membahas lebih lanjut keterkaitan antara temuan kegiatan dengan teori, penelitian terdahulu, serta implikasi praktis bagi penguatan tata kelola lingkungan di tingkat kelurahan.



Gambar 2. Dokumentasi saat penyerahan sertifikat kepada pihak kelurahan

Masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang memadukan edukasi, diskusi partisipatif, dan pendampingan implementatif mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat sekaligus memperkuat komitmen kolektif dalam tata kelola lingkungan berbasis partisipasi warga. Peningkatan rata-rata hasil evaluasi peserta dari sebelum hingga sesudah kegiatan menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung tidak hanya memberikan tambahan informasi, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif lebih efektif dibandingkan penyampaian informasi yang bersifat satu arah karena masyarakat memperoleh ruang untuk mengaitkan materi dengan pengalaman nyata yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan tersebut sejalan dengan tujuan kegiatan yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan, yaitu memperkuat literasi lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan membangun kolaborasi antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat. Sebelum kegiatan dilaksanakan, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pengelolaan lingkungan sebagai tanggung jawab pemerintah kelurahan atau petugas kebersihan. Setelah proses edukasi dan diskusi berlangsung,

terjadi perubahan persepsi bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat. Perubahan cara pandang tersebut menjadi indikator penting bahwa proses pemberdayaan tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran sosial yang menjadi dasar terbentuknya perilaku kolektif dalam menjaga lingkungan.

Temuan tersebut mendukung konsep *Collaborative Environmental Governance* yang dikemukakan oleh Arai dkk. (2021), bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbagai aktor untuk membangun kolaborasi, saling berbagi pengetahuan, serta mengambil keputusan secara bersama. Dalam kegiatan ini, masyarakat tidak ditempatkan sebagai penerima manfaat semata, melainkan sebagai mitra aktif yang terlibat sejak proses identifikasi masalah, penyusunan rencana aksi, hingga evaluasi kegiatan. Pola tersebut memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program sehingga peluang keberlanjutan kegiatan menjadi lebih besar dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada penyuluhan atau sosialisasi sesaat.

Hasil kegiatan ini juga memperkuat teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Ndraha, yang menjelaskan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pada kegiatan ini, keterlibatan masyarakat terlihat melalui proses diskusi kelompok yang menghasilkan identifikasi persoalan lingkungan berdasarkan kondisi nyata di lapangan serta penyusunan rencana aksi yang disepakati bersama. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kehadiran pada kegiatan, tetapi berkembang menjadi keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan lingkungan di tingkat lokal.

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, hasil kegiatan ini juga sejalan dengan pandangan Mikkelsen yang menyatakan bahwa partisipasi bukan sekadar kontribusi masyarakat terhadap program pembangunan, tetapi merupakan proses pembelajaran yang mampu meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat. Diskusi partisipatif yang dilaksanakan selama kegiatan memberikan kesempatan kepada peserta untuk saling bertukar pengalaman mengenai berbagai persoalan lingkungan yang mereka hadapi. Proses tersebut tidak hanya menghasilkan solusi yang lebih kontekstual, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri masyarakat dalam menyampaikan gagasan serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Proses pemberdayaan yang berlangsung telah mendorong perubahan dari pola hubungan yang sebelumnya bersifat *top-down* menuju pola kemitraan yang lebih kolaboratif.

Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian Lukman dkk. (2021), kegiatan ini menunjukkan kesamaan dalam hal pentingnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai prasyarat keberhasilan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Namun demikian, terdapat perbedaan pada pendekatan yang diterapkan. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kolaborasi dalam pengelolaan lingkungan, sedangkan kegiatan pengabdian ini mengintegrasikan tiga dimensi utama secara bersamaan, yaitu peningkatan literasi lingkungan, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, dan penyusunan rencana aksi partisipatif. Integrasi ketiga dimensi tersebut menjadi nilai tambah karena perubahan pengetahuan diikuti dengan pembentukan komitmen kelembagaan yang mendukung keberlanjutan program.

Hasil kegiatan ini juga memperkuat temuan Mandasari dkk. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan lokal dalam mengoordinasikan berbagai aktor yang terlibat. Selama pelaksanaan kegiatan, terlihat bahwa pemerintah kelurahan memiliki komitmen yang baik dalam mendukung program, namun mekanisme koordinasi sebelumnya belum berjalan secara sistematis. Melalui penyusunan rencana aksi bersama, setiap unsur masyarakat memperoleh pembagian peran yang lebih jelas sehingga koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi lebih terarah. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan lokal merupakan faktor penting untuk menjaga keberlanjutan program setelah kegiatan pengabdian selesai. Selain menunjukkan keberhasilan program, hasil kegiatan juga mengidentifikasi beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Faktor pertama adalah dukungan pemerintah Kelurahan Sumur Pecung yang memberikan akses dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sejak tahap persiapan hingga evaluasi. Dukungan tersebut mempermudah proses koordinasi dengan masyarakat sehingga tingkat kehadiran peserta mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor kedua adalah masih kuatnya modal sosial masyarakat berupa budaya gotong royong, hubungan sosial yang harmonis, serta keterbukaan masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan. Modal sosial tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun kolaborasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Faktor ketiga adalah penggunaan metode pembelajaran partisipatif yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pendapat dan berbagi pengalaman sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih interaktif dan kontekstual.

Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan juga menghadapi beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan program selanjutnya. Salah satu kendala yang masih ditemukan adalah keterbatasan waktu pendampingan sehingga proses implementasi rencana aksi belum dapat dipantau secara optimal dalam jangka panjang. Selain itu, tingkat kesibukan masyarakat yang berbeda-beda menyebabkan tidak seluruh peserta dapat terlibat secara intensif pada setiap tahapan kegiatan lanjutan. Kendala lainnya adalah belum tersedianya sarana pendukung pengelolaan lingkungan, seperti fasilitas pemilahan sampah dan media edukasi yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat perlu diikuti oleh dukungan fasilitas dan kebijakan yang memadai agar perubahan perilaku dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dari sisi implikasi praktis, kegiatan ini memberikan gambaran bahwa model pemberdayaan berbasis edukasi, diskusi partisipatif, dan pendampingan implementatif dapat dijadikan sebagai alternatif pendekatan dalam penguatan tata kelola lingkungan di tingkat kelurahan. Model tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat hubungan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sehingga menghasilkan komitmen bersama dalam mengelola lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan ini memiliki potensi untuk direplikasi pada wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial dan kelembagaan yang relatif serupa.

Secara akademik, kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik *Collaborative Environmental Governance* pada tingkat lokal. Berbeda dengan sebagian besar kegiatan pengabdian yang masih berorientasi pada penyuluhan atau sosialisasi, kegiatan ini mengintegrasikan proses edukasi, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, serta penyusunan rencana aksi kolaboratif dalam

satu rangkaian kegiatan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi masyarakat akan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan apabila diikuti oleh penguatan kelembagaan dan mekanisme kolaborasi antarpemangku kepentingan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan luaran berupa peningkatan pengetahuan masyarakat, tetapi juga memberikan model pemberdayaan yang dapat dikembangkan dalam program pengabdian kepada masyarakat pada bidang tata kelola lingkungan.

Keberlanjutan program menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian setelah kegiatan pengabdian selesai dilaksanakan. Berdasarkan hasil diskusi bersama pemerintah kelurahan dan peserta, disepakati beberapa langkah tindak lanjut, yaitu pembentukan kader lingkungan pada tingkat masyarakat, pelaksanaan forum koordinasi lingkungan secara berkala, integrasi program lingkungan ke dalam agenda pembangunan kelurahan, serta pendampingan lanjutan melalui kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah kelurahan. Strategi tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan program sehingga perubahan pengetahuan yang telah dicapai dapat berkembang menjadi perubahan perilaku dan budaya masyarakat dalam menjaga lingkungan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan telah mampu menjawab permasalahan yang diidentifikasi pada tahap awal, yaitu rendahnya literasi lingkungan, belum optimalnya partisipasi masyarakat, serta terbatasnya kapasitas kelembagaan lokal. Keterpaduan antara edukasi, diskusi partisipatif, pendampingan, dan penyusunan rencana aksi telah menghasilkan perubahan pada aspek pengetahuan, komitmen, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi

masyarakat Kelurahan Sumur Pecung, tetapi juga memperkaya model implementasi tata kelola lingkungan berbasis partisipasi warga yang dapat dijadikan referensi bagi pelaksanaan program pengabdian serupa di masa mendatang.



Gambar 3. Dokumentasi saat foto bersama dengan seluruh peserta PkM.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Sumur Pecung menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis edukasi, diskusi partisipatif, dan pendampingan implementatif efektif dalam memperkuat tata kelola lingkungan berbasis partisipasi warga. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep tata kelola lingkungan, pentingnya partisipasi dalam pengelolaan lingkungan, penerapan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R), serta peran kelembagaan lokal dalam mendukung keberlanjutan program. Selain meningkatkan aspek pengetahuan, kegiatan ini juga berhasil membangun kesadaran kolektif bahwa pengelolaan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah kelurahan dan masyarakat, sehingga mendorong tumbuhnya komitmen untuk berkolaborasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan lingkungan.

Pelaksanaan diskusi partisipatif dan penyusunan rencana aksi bersama menjadi luaran strategis yang memperkuat koordinasi antaraktor lokal serta meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengidentifikasi

permasalahan, menetapkan prioritas, dan merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan wilayah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola lingkungan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan literasi masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan membangun mekanisme kolaborasi, memperkuat kelembagaan lokal, dan menciptakan ruang partisipasi yang inklusif. Sehingga, pendekatan pemberdayaan yang diterapkan mampu menjawab *practice gap* yang diidentifikasi pada tahap awal, yaitu masih terbatasnya model pengabdian yang mengintegrasikan edukasi, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi masyarakat dalam satu kerangka pemberdayaan yang berkelanjutan.

Dari sisi kontribusi, kegiatan ini menghasilkan model penguatan tata kelola lingkungan berbasis partisipasi warga yang mengintegrasikan peningkatan kapasitas individu, penguatan kelembagaan lokal, dan penyusunan rencana aksi kolaboratif sebagai satu kesatuan proses pemberdayaan masyarakat. Model tersebut memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah kelurahan sebagai alternatif pendekatan dalam pengembangan program lingkungan berbasis masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan implementasi *collaborative environmental governance* pada tingkat lokal. Pendekatan ini berpotensi direplikasi pada wilayah lain yang memiliki karakteristik permasalahan serupa dengan tetap memperhatikan kondisi sosial, kelembagaan, dan kebutuhan masyarakat setempat. Agar dampak program dapat dipertahankan dalam jangka panjang, diperlukan komitmen berkelanjutan dari pemerintah kelurahan, masyarakat, dan perguruan tinggi melalui pembentukan kader lingkungan, pelaksanaan forum koordinasi secara berkala, pengintegrasian program lingkungan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan kelurahan, serta pendampingan berkelanjutan untuk memastikan implementasi rencana aksi

berjalan secara konsisten. Dengan langkah tersebut, hasil kegiatan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan masyarakat, tetapi berkembang menjadi perubahan perilaku, penguatan kelembagaan, dan terbentuknya budaya partisipatif yang mendukung terwujudnya tata kelola lingkungan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2025). *DAN PENGEMBANGAN WILAYAH DENGAN REKOMENDASI PRAKTIS: STUDI KASUS*. 3.
- Dan, P., Kerja, D., & Pemerintah, D. I. (2025). *Pengaruh gaya kepemimpinan transaksional terhadap prestasi dan disiplin kerja di pemerintah daerah*. 3, 33–40.
- Abidin, Dindin. 2023. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Arai, Y., Maswadi, Oktoriana, S., Suharyani, A., Didik, & Inoue, M. (2021). *How can we mitigate power imbalances in collaborative environmental governance? Examining the role of the village facilitation team approach observed in West Kalimantan, Indonesia*. *Sustainability*, 13(7), 3972.
- Lukman, A. H., Gunawan, B., & Parikesit. (2021). *Finding common ground in collaborative environmental management: A case study in Cijedil Forest Landscape, Cianjur*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(2), 399–408.
- Mandasari, P., Ferizaldi, Aisyah, T., Hasyem, M., & Maryam. (2025). *Collaborative governance in environmental management for climate change mitigation in Rayeuk Kareung Village, North Aceh*. *Jurnal Transparansi Publik*, 5(2).
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan upaya - upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Mubyarto dkk. 1984. Nelayan dan Kemiskinan. Jakarta: CV. Rajawali.
- Ndraha. Taliziduhu. 1987. Pembangunan Masyarakat. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Sari, Ayu, Ratna. 2024. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pontana Kayang Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah (Skripsi).
https://repositori.uin-alauddin.ac.id/29695/1/30400120054_Ayu%20Ratna%20Sari.pdf.
- Subang, S. A. (2025). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam
- Suaib. 2023. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Wahyudin, S., Darma, D. A., & Terbuka, U. (2025). *Pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai samsat kabupaten bengkulu selatan*. 3, 26–32.